

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Cetakan ke-3)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (cet V)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asisi, Agnes M.D. 2015. *Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Perkara Pidana Korupsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2007. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Memberantas korupsi bersama KPK : (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, Marwan. 2012, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi.
- Fahrojih, Ikhwan. 2016. *Hukum acara pidana korupsi*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, M. Guntur. 2007. *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Paper. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Immanuel, Yopie Morya. 2012. *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: CV Keni Media.
- Kamil, Iskandar. 2003. *Kode Etik Profesi Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Code Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Kristiana, Yudi. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Mahmudin. 2006. *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*. Varia Pengadilan.

- Marpaung, Leden. 2000. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP UNDIP.
- O.C, Kalgis. 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim (Edisi Kedua)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Romli, A., & Korupsi, S. M. 2004. *Aspek Nasional dan Aspek International*. Bandung: Mandar Maju.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru
- Sinaga, Dahlan. 2015. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Nusa Media.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*, Bandung : Rineka Cipta.
- Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Witanto, Darmoko Yuti, dan Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

2. Jurnal

- Alvionita, Pini . 2016. Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pidana. *Jurnal Katalogis*, 4.
- Arianto, Henry. 2012. Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9 (3).
- Diansyah, Febri. 2009. *Senjakala Pemberantasan Korupsi: Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan Tipikor*, *Jurnal Konstitusi*, 6 (2).
- Fitra, Nur. 2017. Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, V (3).
- Floranta, Firman. 2015. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12.
- Hadiyanto, Alwan. 2016. Tinjauan Yuridis Fungsi Surat Dakwaan dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Pengadilan, *PETITA*, 3 (2).
- Halomoan, Putra. 2015. Tinjauan Yuridis Tentang Upaya Hukum, *Yurisprudencia*, 1(1).
- Ifrani. 2017. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al'Adl*, IX (3).
- Maulida, Ali. 2020. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam. *Al-Mashlahah*, 8 (1).
- Monteiro, Josef . 2007. Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 25 (2).
- Nugroho, Hibnu. 2013. Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervise Dalam Penyidikan Tindak Pidana Krupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13 (3).
- Nurhafifah, dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSYIAH*,(66)
- Ramelan. 2009. Kasasi Terhadap Putusan Bebas. *Jurnal Hukum Prioris*, 2, (3).
- Rozi, Fachrul. 2018. Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2).
- Salim, Agus. 2020. Implikasi Yuridis Bagi Pelapor Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Di Tingkat Pengadilan Negeri. *Paulus Journal of Society Engagement*, 1 (2).

- Simamora, Janpatar. 2014. Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas. *Jurnal Yuridis*, 7 (1).
- Sina, La. 2008. Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26 (1)
- Soehartono. 2014. Mengembangkan Pemikiran Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa. *Yustisia*, 3 (1).
- Syamsudin. 2007. Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum, *Jurnal Unisia*, XXX, (64).
- Vially, Ryvaldo. 2020. Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, IX (4).
- Wattimena, Husin. 2016. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Tahkim*, XII (2).
- Yanto, Oksidelfa. 2017. Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu. *Legislasi Indonesia*, 14 (1).

3. Peraturan Perundang-Undangan :

- Pemerintah Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 1946. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 1981. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2001. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta : Sekretariat Negara.